

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP PENERIMAAN PKB DAN BBNKB SERTA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 1991-2010

**Ni Nyoman Pande Ariasih
I Made Suyana Utama
I G A P Wirathi**

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail : pande.ariasih@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bersumber dari pendapatan daerah antara lain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Besarnya pendapatan daerah secara teoritis dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan PDRB per kapita riil. Kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB serta kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali selama tahun 1991-2010. Selanjutnya data yang dianalisis diperoleh dari insitusi pada Pemerintah Provinsi Bali dan teknik yang digunakan adalah analisis jalur dengan penerapan model regresi linear.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

Kata kunci : jumlah penduduk, PDRB per kapita, PKB, BBNKB, kemandirian keuangan daerah

ABSTRACT

Development aims for the public welfare and implemented through governance. Financing in local governance sourced from regional revenues, among others are motor vehicle tax (PKB) and motor vehicle ownership's transfer tax (BBNKB). The regional revenues theoretically affected by the number of population and PDRB (Gross Regional Income) per-capita real. Regional self-reliance in the operation of the regional autonomy could be seen from fiscal decentralization degree (DDF).

The purpose of this study was to determine the effect of the number of population and PDRB per-capita towards PKB and BBNKB revenues also regional self-financing of Bali Province during 1991-2010. Furthermore, the data were analyzed obtained from the Bali Provincial Government institutions and technique of quantitative analysis, namely, directed analysis with the application of linear regression model.

Based on the analysis, it can be concluded that the number of population and PDRB per-capita has a positive and significant effect towards the revenues of PKB and BBNKB. The number of population and PDRB per-capita indirect effect on regional self-financing through acceptance of PKB and BBNKB.

Keywords: the number of population, PDRB per-capita, PKB, BBNKB, regional self-financing

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun komponen PAD antara lain adalah Pajak Daerah. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun penerimaan daerah Provinsi Bali dari PKB dan BBNKB adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Realisasi PKB, BBNKB, dan PAD Provinsi Bali, Tahun 1991 – 2010

Tahun	PKB (Rp. jutaan)	BBNKB (Rp. jutaan)	Jumlah PKB & BBNKB (Rp. jutaan)	PAD (Rp. jutaan)	PKB & BBNKB thd PAD (%)
1	2	3	4 = (2+3)	5	6
1991	13.703,46	14.101,28	27.804,74	39.163,07	71
1992	13.040,12	15.419,94	28.460,07	39.112,94	73
1993	19.824,93	13.620,43	33.445,36	41.619,44	80
1994	30.511,40	20.853,47	51.364,87	63.084,07	81
1995	34.032,39	30.488,26	64.520,64	80.445,45	80
1996	30.923,60	45.012,55	75.936,16	97.210,93	78
1997	35.015,21	48.395,43	83.410,65	103.925,44	80
1998	43.998,84	27.725,60	71.724,44	81.914,32	88
1999	65.430,13	64.190,12	129.620,25	229.742,79	56
2000	71.495,86	91.902,16	163.398,01	237.915,03	69
2001	123.789,39	158.858,65	282.648,04	400.473,59	71
2002	141.809,26	138.874,50	280.683,76	465.749,52	60
2003	155.961,43	127.608,36	283.569,79	381.854,49	74
2004	221.902,09	228.343,93	450.246,01	559.689,36	80
2005	264.488,61	312.757,73	577.246,34	742.886,07	78
2006	290.800,04	199.789,94	490.589,98	729.338,16	67
2007	342.422,96	234.034,02	576.456,98	834.475,06	69
2008	392.545,91	351.666,23	744.212,14	1.055.454,26	71
2009	443.930,83	374.839,63	818.770,47	1.163.949,23	70
2010	502.676,65	492.816,51	995.493,16	1.398.438,48	71

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Bali, 2011 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa PKB dan BBNKB merupakan sumber utama dari PAD Provinsi Bali yaitu dengan kontribusi di atas 50 persen tiap tahunnya. Secara teoritis, besarnya pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan PDRB per kapita riil. Menurut Chairany (2010) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap, sedangkan PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2010).

Dengan tingginya jumlah penduduk dan semakin tingginya PDRB per kapita menyebabkan semakin meningkatnya daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka semakin meningkat pula pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Bali selama tahun 1991-2010.

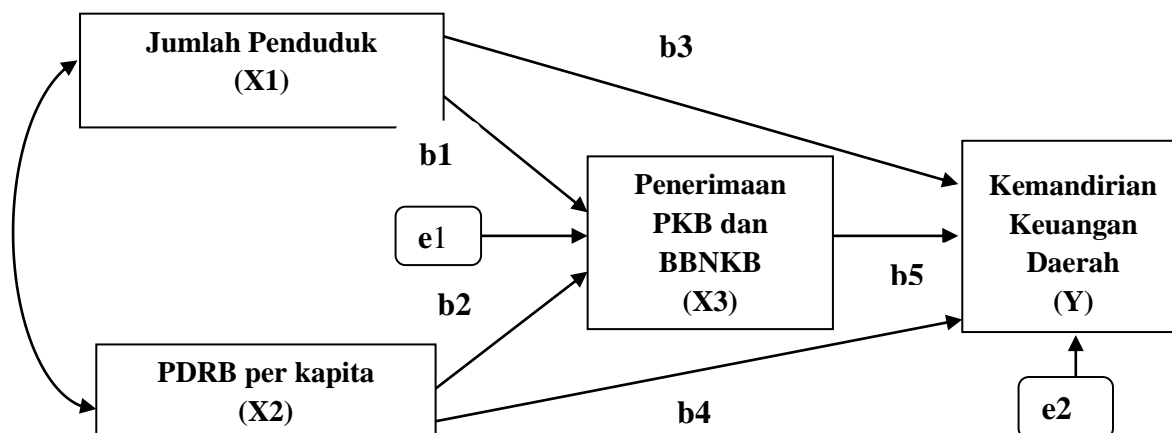
- 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali selama tahun 1991-2010.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Bali selama tahun 1991-2010.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*) dengan 4 (empat) variabel yaitu jumlah penduduk, PDRB per kapita, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Bali, menggunakan data sekunder yang diperoleh pada instansi Pemerintah Provinsi Bali dengan *time series* dari tahun 1991 – 2010. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi.

Teknik statistik yang digunakan antara lain analisis deskriptif yang meliputi perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat dengan Program SPSS dan Exel. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (Robert D, Rutherford dalam Sarwono, 2007). Model analisis jalur penelitian ini adalah seperti pada gambar 1.



Gambar 1 Model Analisis Jalur Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 1991-2010

Koefisien jalur dalam penelitian ini didapat melalui perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) memakai program SPSS versi 17 terhadap model persamaan. Untuk memperoleh koefisien jalur, diperoleh secara bertahap dengan model persamaan regresi yaitu :

1. Model 1 : Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X_1) dan PDRB per Kapita (X_2) terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3)
2. Model 2 : Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X_1), PDRB per Kapita (X_2) dan Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Adapun model persamaan regresi, klasifikasi variabel dan persamaan jalur ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Klasifikasi Variabel dan Persamaan Jalur

Model	Variabel Independen	Variabel Dependen	Persamaan
1	a. Jumlah Penduduk b. PDRB per Kapita	Penerimaan PKB dan BBNKB	$X_3 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$
2	a. Jumlah Penduduk b. PDRB per Kapita c. Penerimaan PKB dan BBNKB	Kemandirian Keuangan Daerah	$Y = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5X_3 + e_2$

Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X_1) dan PDRB per Kapita (X_2) terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3)

Melalui uji regresi linear sederhana, diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk dan PDRB per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Persamaan Regresi Linear Model 1 : Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-243328	27925,540		-8,713	.000
Jumlah Penduduk	80,279	11,041	.755	7,271	.000
PDRB per kapita	9,978	3,901	.266	2,558	.020

Sumber : Data diolah

Sesuai hasil analisis, persamaan regresi pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang dapat disusun yaitu :

$$\hat{X}_3 = 0,755 X_1 + 0,266 X_2 \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = PDRB Per Kapita

X_3 = Penerimaan PKB dan BBNKB

Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X_1), PDRB per Kapita (X_2) dan Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Hasil olahan data pengaruh jumlah penduduk, PDRB per Kapita dan Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap kemandirian keuangan daerah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Model Regresi Linear Model 2 : Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita dan Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	99,278	60,825		1,632	,122
	Jumlah Penduduk	-,016	,021	-,357	-,787	,443
	PDRB per kapita	-,004	,004	-,228	-,868	,398
	Penerimaan PKB dan BBNKB	,001	,000	1,172	2,244	,039

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil analisis dapat disusun model persamaan regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB per Kapita, serta Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap kemandirian keuangan daerah, yaitu :

$$\hat{Y} = -0,357 (X_1) - 0,228 (X_2) + 1,172 (X_3) \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = PDRB Per Kapita

X_3 = Penerimaan PKB dan BBNKB

Evaluasi terhadap Validitas Model

Koefisien determinasi total diperoleh dengan menggunakan rumus 1 dan rumus 2 serta perhitungan SPSS. Adapun besaran koefisien determinasi total yang

didapat adalah 0,942 yang mengandung makna bahwa model yang telah terbentuk dapat memberikan informasi sebesar 94,2 %, sedangkan sisanya sebesar 5,8 % ditentukan oleh variabel lain diluar model.

Koefisien Jalur

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, diperoleh ringkasan koefisien jalur sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5
Ringkasan Koefisien Jalur

Regresi	Koef. Reg. Standar	Koef. Unstandardized	Standar Error	t hitung	p. value	Keterangan
$X_1 \rightarrow X_3$	0,755	80,279	11,041	7,271	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow X_3$	0,266	9,978	3,901	2,558	0,020	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y$	-0,357	-0,016	0,021	-0,787	0,443	Non Signifikan
$X_2 \rightarrow Y$	-0,228	-0,04	0,004	-0,868	0,398	Non Signifikan
$X_3 \rightarrow Y$	1,172	0,001	0,000	2,244	0,039	Signifikan

Sumber : Data diolah

Keterangan :

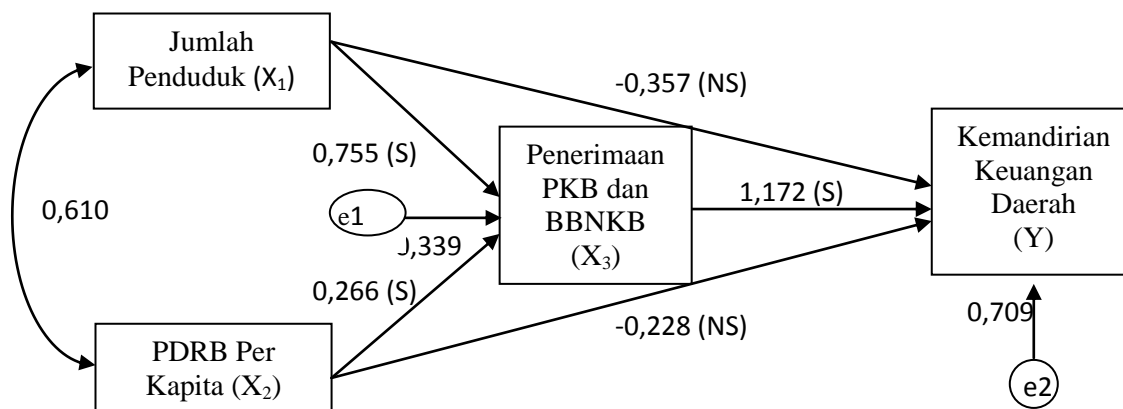
Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = PDRB Per Kapita

X_3 = Penerimaan PKB dan BBNKB

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). PDRB per Kapita (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Untuk variabel penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y).



Gambar 2 Pengaruh Jumlah penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991 – 2010

Dalam pengujian hipotesis ini yang diperlukan adalah adanya pengaruh langsung positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh anak panah antar variabel, yaitu jumlah penduduk (X_1), PDRB per Kapita (X_2), Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) dan kemandirian keuangan daerah (Y).

Berdasarkan hasil olah data yang ditampilkan pada Tabel 6, diperoleh informasi bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PKB dan BBNKB mempunyai koefisien regresi sebesar 0,755 dan hipotesis nol ditolak dengan p value sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.

Selanjutnya, pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB mempunyai koefisien regresi sebesar 0,266 dan standar eror 3,901 serta p value sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar -0,357 dan standar eror 0,021 serta *p value* sebesar 0,433. Hal ini berarti jumlah penduduk tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adapun pengaruh variabel PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar -0,228 dengan standar eror sebesar 0,004. Hipotesis nol diterima dengan *p value* sebesar 0,398 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat pula bahwa pengaruh penerimaan PKB dan BBNKB terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar 1,172 dan standar eror sebesar 0,000. Hipotesis nol ditolak karena *p value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa penerimaan PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Modifikasi Model

Berdasarkan *theory trimming*, apabila terdapat variabel yang tidak signifikan, maka model struktur analisis jalur tersebut perlu diperbaiki dengan cara menghilangkan jalur yang tidak signifikan. Oleh karena dalam model penelitian ini terdapat variabel yang tidak signifikan, maka perlu dilakukan modifikasi yaitu terhadap model ke-2 sehingga menjadi seperti berikut :

$$Y = b_5 X_3 + e_2 \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

Y = Kemandirian keuangan daerah

X₃ = Penerimaan PKB dan BBNKB

Pengaruh Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah setelah dilakukan modifikasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Persamaan Regresi Linear Model 2 Hasil Modifikasi : Pengaruh Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	40,181	5,854		6,864	.000
Penerimaan PKB dan BBNKB	,000	,000	,679	3,929	.001

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,679 (X_3) \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

X₃ = Penerimaan PKB dan BBNKB

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

Adapun ringkasan koefisien jalur setelah dilakukan modifikasi berdasarkan Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 6 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Modifikasi Ringkasan Koefisien Jalur

Regresi	Koef. Reg. Standar	Koef. Unstandardized	Standar Error	t hitung	P. value	Keterangan
X ₁ → X ₃	0,755	80,279	11,041	7,271	0,000	Signifikan
X ₂ → X ₃	0,266	9,978	3,901	2,558	0,020	Signifikan
X ₃ → Y	0,679	0,000	0,000	3,929	0,001	Signifikan

Sumber : Data diolah

Keterangan :

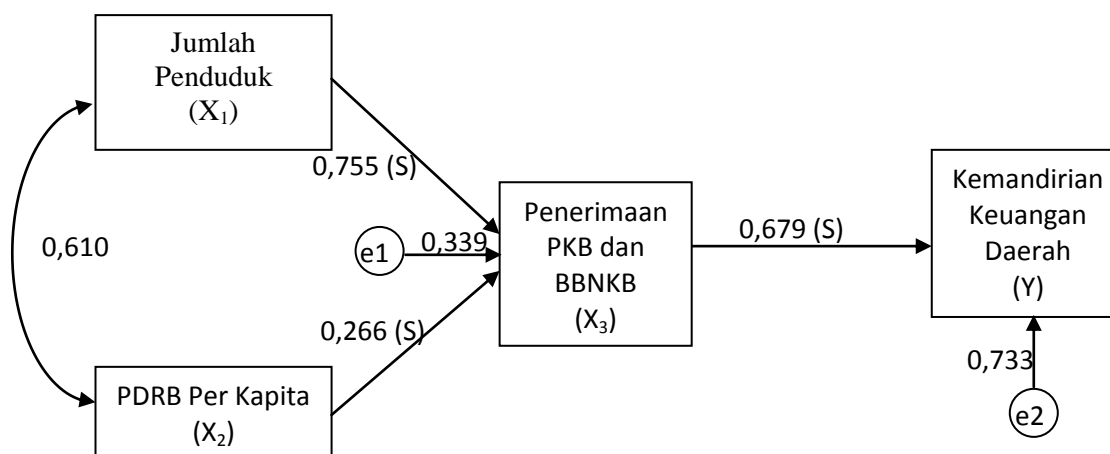
Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X_3 = Penerimaan PKB dan BBNKB

X_2 = PDRB per Kapita

X_1 = Jumlah Penduduk

Tabel 7 mendeskripsikan bahwa Jumlah Penduduk (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3). PDRB per Kapita (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3). Variabel Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Berdasarkan Tabel 7, diagram jalur setelah modifikasi adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991 – 2010 (dimodifikasi)

Nilai koefisien jalur setelah modifikasi (Tabel 7) dengan sebelum modifikasi (Tabel 5) menunjukkan besaran yang tidak sama. Nilai koefisien regresi jalur Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) setelah modifikasi sebesar 0,679 yaitu lebih kecil dari sebelum modifikasi yaitu sebesar 1,172. Nilai standar eror jalur Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) setelah modifikasi

sama dengan sebelum dilakukan modifikasi yaitu sebesar 0,000. Nilai *p. value* untuk jalur Penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) setelah modifikasi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari sebelum dilakukan modifikasi yaitu sebesar 0,039.

Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat besaran pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel, yang secara rinci disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	X1			X2			X3		
	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT
X3	0,755	-	0,755	0,266	-	0,266	-	-	-
Y	-	0,513	0,513	-	0,181	0,181	0,679	-	0,679

Sumber : Data diolah

Keterangan :

- PL = Pengaruh Langsung
- PTL = Pengaruh Tidak Langsung
- TP = Total Pengaruh
- Y = Kemandirian Keuangan Daerah
- X_1 = Jumlah Penduduk
- X_2 = PDRB per Kapita
- X_3 = Penerimaan PKB dan BBNKB

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan terdapat beberapa hubungan dalam penelitian ini, yaitu bahwa pengaruh langsung jumlah penduduk (X_1) terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) adalah sebesar 0,755. Jumlah penduduk (X_1) tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), namun secara tidak langsung pengaruh jumlah penduduk (X_1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) melalui penerimaan PKB dan BBNKB (X_3) adalah sebesar 0,513 ($0,755 \times 0,679$).

Pengaruh langsung PDRB per Kapita (X2) terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X3) adalah sebesar 0,266. PDRB per Kapita (X2) tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), secara tidak langsung pengaruh PDRB per Kapita (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) melalui penerimaan PKB dan BBNKB (X3) adalah sebesar 0,181 ($0,266 \times 0,679$). Pengaruh langsung Penerimaan PKB dan BBNKB (X3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 0,679.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB

Penduduk berperan dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Abdul Halim (2001) mengatakan bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Faisal Syafruddin (2003) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat, akan diikuti oleh

pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya, sehingga memungkinkan penduduk dapat membeli kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor secara langsung mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Wayan Yustita Radini (2010), penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Variabel-Variabel yang Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bali Tahun 1999-2009”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) per kapita secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara parsial PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sesuai hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Taufik Kurrohman (2011), penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Perkembangan Kemampuan Keuangan Berbasis Rasio APBD Antar Daerah dengan PDRB Tinggi dan Rendah di Era Otonomi”, dengan populasi kabupaten dan kota se Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan PDRB tinggi tidak berbeda perkembangan kemampuan keuangannya dengan daerah ber PDRB rendah.

Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung melalui Penerimaan PKB dan BBNKB

Secara teoritis jumlah penduduk dan PDRB per kapita dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karenanya, jumlah penduduk yang tinggi dan didukung oleh PDRB per kapita yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sekaligus peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak terutama penerimaan PKB dan BBNKB. PKB dan BBNKB merupakan sumber PAD, sehingga dengan meningkatnya penerimaan PKB dan BBNKB akan menyebabkan peningkatan PAD yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Halim, 2001). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sidik, 2002). Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya (Shome, 2003). Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Feltensein dan Iwata, 2005). Sejak dimulainya Tax Reform 1983, Indonesia sangat mengandalkan penerimaan dari sektor penerimaan pajak (Fajar, 2006). Pajak

daerah merupakan sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Henry, 2010). Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, salah satu komponen Pajak Provinsi adalah PKB dan BBNKB.

Sesuai analisis yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, namun secara tidak langsung jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB. Penerimaan PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah atau dapat ditafsirkan secara teoritis bahwa kemandirian keuangan daerah akan meningkat jika penerimaan PKB dan BBNKB meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riski Ariyeni (2009), penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.

2. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Bali perlu terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan PDRB per kapita dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih tinggi dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, salah satunya dengan membuat kebijakan penertiban administrasi sektor BBNKB sehingga tidak ada lagi masyarakat yang enggan mengurus BBNKB bagi kepemilikan kendaraan yang telah berpindah.

Referensi

- Alexander. 1996. “Studi Penerimaan Pemerintah Daerah Tk I Kalimantan Barat dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor” (*tesis*). Yogyakarta: UGM.
- Aguslan, Henry. 2010. “Analisis Struktur Pajak Daerah sebagai Sumber Potensial PAD Sumatera Utara” (*tesis*). Medan: Universitas Negeri Medan.
- Ariyeni, Riski. 2009. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara” (*skripsi*). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Bali. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Chairany, Mirna. 2010. "Analisis Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Bolak pada Tahun 2012" (*Tugas Akhir*). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Fajar, Muhammad. 2006. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Uplift pada Industri Hulu Migas. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi*, Vol 4: 3.
- Feltensein, Andrew and Shigeru Iwata. 2006. *Decentralitation and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy Has It's Costs. Journal of Development Economic*, Vol.76: 2.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.
- Haryanto, Joko Tri. 2006. "Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis" (*Jurnal Manajemen dan Usahawan*). Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kurrohman, Taufik. 2011. "Analisis Komparasi Perkembangan Kemampuan Keuangan Berbasis Rasio APBD Antar Daerah dengan PDRB Tinggi dan Rendah di Era Otonomi" (*Jurnal Akuntanssi dan Keuangan*). Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Mithneck, Berth A. 1991. *Territoriality and Regional Economic Autonomy in the USSR, Studies in Comparative Communism*, Vol. 24: 2.
- Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai Tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Putri, Arimbi Riau. 2009. "Anilisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pesissir Selatan" (*skripsi*). Padang : Universitas Andalas.
- Radianto, Elia. 1997 "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku". Jakarta: LP3ES.
- Radini, Yustita Ni Wayan. 2010. "Analisis Efektivitas dan Variabel-Variabel yang Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bali Tahun 1999-2009" (*tesis*). Denpasar: Universitas Udayana.
- Richard L Kitchen : *Finance for The Developing Countries*; John Wiley & Sons, 1986.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Shome, Parthasarathi. 2003. *Tax Policy and the Design of a Single Tax System. Asia Pasific Bulletin: International Bureau of Fiscal Documentation.*

Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (serial online), April, www.mediaindo.co.id.

Syafruddin, Faisal. 2003. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta” (*tesis*). Jakarta: Universitas Indonesia.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Utami, Haryoshi. 2011. “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi” (*tesis*). Jambi: Universitas Andalas.

_____. 2000. Undang-Undang Nomor 34 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.